

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP
ALOKASI BELANJA MODAL PADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

INDRA SULISTYANINGSIH
NIM. 12030115120094

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Indra Sulistyaningsih
Nomor Induk Mahasiswa : 12030115120094
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PENGARUH PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD), DANA
ALOKASI UMUM (DAU) DAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TERHADAP ALOKASI BELANJA
MODAL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH**
Dosen Pembimbing : Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt., CA

Semarang, 08 Januari 2019

Dosen Pembimbing,



(Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt., CA)

NIP.197412222000121001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Indra Sulistyaningsih

Nomor Induk Mahasiswa : 12030115120094

Fakultas/Jurusan : Ekonomika/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal

Tim Penguji :

1. Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt., CA (.....)

2. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt (.....)

3. Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Indra Sulistyaningsih, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 08 Februari 2019
Yang membuat pernyataan

Indra Sulistyaningsih
NIM. 12030115120094

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence and analyze the influence of Own Source Revenue (PAD), General Allocation Funds (DAU) and Special Allocation Funds (DAK) on Allocation of Capital Expenditures based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government.

The sample are 29 districts and 6 cities in Central Java Province which submitted Local Government Financial Reports (LKPD) during period of 2013 to 2017. The sample was chosen using a census method and obtained observations of 175 samples, after checking there are outlier data as 6 so the total final sample as many as 169 samples. The analytical method in this study is multiple linear regression analysis using IBM SPSS software.

The results of this study indicate that Own Source Revenue (PAD), General Allocation Funds (DAU) and Special Allocation Funds (DAK) have a significant positive effect on Allocation of Capital Expenditures.

Keywords: Own Source Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Capital Expenditures, LKPD

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Modal yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sampel pada penelitian ini yaitu 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah yang menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode 2013-2017. Sampel dipilih menggunakan metode sensus dan diperoleh observasi sejumlah 175 sampel, setelah dilakukan pengecekan terdapat data outlier sebanyak 6 sehingga total sampel akhir sebanyak 169 sampel. Metode analisis pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *software* IBM SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Modal.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, LKPD.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH”. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Dalam proses penyusunan skripsi, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan baik secara langsung dan tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Fuad, S.E.T., M.Si., Ph.D. selaku Kepala Jurusan Akuntansi yang telah membantu penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
3. Bapak Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan perkuliahan.
5. Ibu Dista selaku Humas dari Badan Pemeriksa Keuangan yang telah membantu dan memberikan arahan dalam permintaan data yang diteliti dalam penelitian skripsi.
6. Ibu, Bapak dan Alm. Ayah, selaku orang tua tercinta, terima kasih atas doa, motivasi, dukungan, semangat, bimbingan, nasehat, pengorbanan, kasih sayang dan uang saku yang tidak habis-habisnya diberikan kepada penulis.
7. Budhe dan pakhde, selaku orang tua yang mengasuh penulis selama di Semarang, terima kasih atas dukungan, semangat, nasehat, kasih sayang, dan jatah makan yang dengan tulus diberikan kepada penulis.
8. Adek-adekku tersayang, Helen Febriyanti, Andhini Widya, Lugas Jati, dan Ulya Wido, terima kasih selalu memberikan dukungan dan hiburan kepada penulis dikala kesepian agar tetap semangat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Teman-temanku di Emyu, Afifah Fauziah, Dhynandra Winda, Anggia Cahyani, Alifah Zulfa, Kiki Elitta, Laras Shatiti, Khairani Erlie, Faizah Nur, Salwa Puji, dan Rosa Yuni yang telah memberikan dukungan, semangat, pengalaman, pembelajaran, kebersamaan, kebahagiaan, canda tawa dan melengkapi masa perkuliahan dengan kenangan yang sangat berharga.

10. Teman-temanku Afifah Fauziah dan Aliferiana Irsyadhea senasib susah, duka, sedih, pilu, sendu, letih, lemah, lesu, dan lunglai karena begadang demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Teman-temanku di Kesayangan Pak Har yang telah saling mendukung, memberi semangat, saran, bantuan, bersama-sama berusaha dan berproses hingga selesainya skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman Akuntansi 2015, terimakasih telah menjadi keluarga selama di FEB dalam berjuang menuntut ilmu dan berbagi cerita, salam Akuntansi Satu Keluarga Akuntansi 2015 Keluarga Selamanya.
13. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih untuk semangat, doa, dan dukungannya dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyusunan maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis selanjutnya.

Semarang, 08 Februari 2019
Yang membuat pernyataan

Indra Sulistyaningsih
NIM. 12030115120094

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Life is tough.

But so are you.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Ibu, Bapak dan Alm. Ayah.

Budhe dan Pakdhe, selaku orang tua selama di Semarang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Agensi.....	12
2.1.2 Teori Pilihan Rasional.....	14
2.1.3 Teori Anggaran Sektor Publik	15
2.1.4 APBD.....	20
2.1.5 PAD.....	24
2.1.6 Dana Perimbangan	29
2.1.7 Belanja Daerah.....	38
2.2 Penelitian Terdahulu	43
2.3 Kerangka Pemikiran	48
2.4 Hipotesis Penelitian	50
2.4.1 Pengaruh PAD Terhadap Alokasi Belanja Modal	50
2.4.2 Pengaruh DAU Terhadap Alokasi Belanja Modal.....	51
2.4.3 Pengaruh DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	55
3.1.1 Variabel Penelitian.....	55
3.1.2 Definisi Operasional	56
3.2 Populasi dan Sampel.....	58
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	59
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	59
3.5 Metode Analisis	59
3.5.1 Statistik Deskriptif	59

	3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	60
	3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda	65
	3.5.4 Pengujian Hipotesis.....	66
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	69
4.2	Analisis Data.....	72
	4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	75
	4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	75
	4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda	83
	4.2.4 Pengujian Hipotesis.....	85
4.3	Interpretasi Hasil.....	90
	4.3.1 Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal	91
	4.3.2 Dana Alokasi Umum Berpengaruh terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal	93
	4.3.3 Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal	95
BAB V	PENUTUP	
5.1	Simpulan.....	98
5.2	Keterbatasan.....	100
5.3	Saran.....	101
	DAFTAR PUSTAKA	103
	LAMPIRAN A	105
	LAMPIRAN B	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	46
Tabel 3.1	Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi	63
Tabel 4.1	Perincian Perolehan Sampel.....	70
Tabel 4.2	Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah	71
Tabel 4.3	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	72
Tabel 4.4	Hasil Uji Normalitas	76
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi	79
Tabel 4.6	Hasil Uji Multikolinieritas	80
Tabel 4.7	Hasil Uji Glejser	83
Tabel 4.8	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	84
Tabel 4.9	Hasil Uji Koefisien Determinasi	86
Tabel 4.10	Hasil Uji Signifikansi Simultan	87
Tabel 4.11	Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual	89
Tabel 4.12	Interpretasi Hasil	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	49
Gambar 4.1	Histogram.....	77
Gambar 4.2	Grafik Normal P-Plot.....	78
Gambar 4.3	Grafik Scatterplot.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Daftar Kabupaten dan Kota Sampel	105
Lampiran B	Hasil Analisis Regresi.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi tahun 1998 telah membawa pengaruh hampir pada semua sektor kehidupan. Termasuk pada sektor publik, pemerintah turut ikut serta melakukan reformasi dalam bidang manajemen keuangan, yaitu tentang hak, otoritas, dan kewajiban pemerintah daerah. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga diperlukan adanya penggantian perundang-undangan. Sebagai pembaharuan kebijakan tersebut, kini telah diterbitkan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 dengan menimbang penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Otonomi daerah memberikan otoritas yang cukup dalam menyelenggarakan pembangunan dengan lebih memperhatikan potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah di setiap masing-masing wilayah di Indonesia. Pemberian hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi daerah harus memenuhi prinsip otonomi, yaitu: demokratisasi, transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi publik (Suryantini, dkk 2017).

Sejak 1 Januari 2001 otonomi daerah telah diberlakukan secara efektif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, daya saing daerah dan persaingan global. Penyerahan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki setiap wilayah untuk menentukan pengeluaran atau belanja daerah dengan berdasar asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah (Kusnandar dan Siswanto, 2012).

Prinsip desentralisasi menyiratkan bahwa tata kelola dan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Suryantini, dkk 2017). Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , dan ditetapkan dalam peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Kusnandar dan Siswanto, 2012).

Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 33 Tahun 2004, sumber penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Sumber Pendanaan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan, Pinjaman Lokal, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada setiap daerah untuk mendanai kebutuhan setiap daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 bahwa Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendanaan ini diperoleh dari transfer dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan besaran dana yang telah ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Selanjutnya berdasar kebijakan desentralisasi, penggunaan semua dana tersebut diserahkan sesuai kebijakan pemerintah daerah otonom masing-masing.

Penganggaran modal dirancang untuk memenuhi kebutuhan publik terhadap fasilitas dan infrastruktur publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kepentingan politik badan legislatif yang terlibat dalam persiapan proses penganggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Era desentralisasi fiskal mendorong pemerintah untuk dapat meningkatkan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan dalam hal layanan sektor publik dapat meningkatkan daya tarik bagi investor dan kepercayaan publik untuk menanamkan investasinya di daerah. Peningkatan investasi modal tersebut dapat membantu pembangunan daerah dalam bentuk aset tetap daerah, seperti peralatan, bangunan, infrastruktur dan aset-aset tetap lainnya. Kepentingan politik dapat menghambat perkembangan otonomi

daerah sehingga mengganggu pelaksanaan dan tujuan desentralisasi (Suryantini, dkk 2017).

Pemerintah pusat dalam menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah disertai dengan penyerahan dan pengalihan masalah pembiayaan. Dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintah pusat telah memberi transfer dana berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan untuk kekurangan anggaran pendanaan diharapkan pemerintah daerah mampu menggali melalui pendanaan sendiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber pembiayaan utama pemerintah daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah yang besar diharapkan mampu mendorong akuntabilitas yang lebih, mampu memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga mampu memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat agar secara langsung dapat meningkatkan kemandirian daerah (Kusnandar dan Siswantoro, 2012) . Namun pada praktiknya, transfer dana dari pemerintah pusat menjadi sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah (Prakosa, 2004).

Sumber daya dan potensi di setiap daerah yang tidak sama dapat menimbulkan adanya kesenjangan keuangan yang dapat memicu gejala kesenjangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Pendanaan dari

pemerintah pusat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar-pemerintah daerah, dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik (*public service*) minimum di seluruh wilayah di Indonesia (Simanjuntak dalam Prakosa, 2004).

Penetapan kebijakan desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian daerah (Adi, 2006). Sesuai dalam UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat setempat melalui peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi suatu daerah masing-masing. Sedangkan UU No. 33 Tahun 2004 membawa dampak perubahan yang mendasar dalam mekanisme pengaturan antara pemerintahan pusat dan daerah.

Menurut Halim (dalam Sumarmi, 2008) daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah mengindikasikan tingkat kemandirian yang rendah pula, sehingga dituntut untuk mengubah struktur belanja menjadi lebih kuat. Daerah-daerah ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki untuk dialokasikan yang lebih besar pada belanja daerah di sektor-sektor produktif. Alokasi belanja modal yang selama ini dianggarkan oleh pemerintah daerah didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Namun selama ini belanja daerah lebih diutamakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Fluktuasi komposisi belanja merupakan salah satu upaya efektif yang dapat dilakukan

pemerintah daerah untuk menaikkan tingkat kepercayaan publik. Fluktuasi atau pergeseran ini diharapkan mampu untuk meningkatkan investasi modal pada daerah (Sumarni, 2008). Tingkat investasi yang semakin tinggi nantinya diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik sehingga suatu saat mampu meningkatkan tingkat kontribusi dan partisipasi publik atau masyarakat terhadap pembangunan yang akan tampak dari ikut meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dikemukakan oleh Mardiasmo (dalam Sumarni, 2008).

Adanya otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri. Meski begitu pemerintah pusat tetap memberikan transfer dana kepada pemerintah daerah berupa Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan data pada tahun 2010 yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dalam proporsi Dana Perimbangan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi bagian terbesar, yaitu sekitar 3,17% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proporsi Dana Perimbangan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah disesuaikan dengan besaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu proporsi Dana Perimbangan akan menurun jika jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah mengalami kenaikan. Walaupun Dana Perimbangan ini masih menjadi sumber pendanaan utama yang diandalkan oleh pemerintah daerah. Namun Dana Alokasi Umum (DAU) hingga saat ini masih tetap menjadi bagian terbesar penganggaran nasional dan merupakan sumber yang paling

diutamakan dalam penganggaran yang disusun oleh pemerintah daerah (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) , semakin tinggi pula alokasi belanja modal suatu daerah. Menurut Suryantini, dkk (2017) alokasi Belanja Modal di semua provinsi di Indonesia secara signifikan tidak ditentukan oleh besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi dengan pendapatan daerah lainnya. Sehingga penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Ni Putu Santti Suryantini, Ica Rika Candraningrat, dan Ni Made Wulandari Kusumadewi (2017) tentang “*THE INFLUENCE OF DAU (GENERAL ALLOCATION FUND) AND DAK (SPECIAL ALLOCATION FUND) ON CAPITAL EXPENDITURE OF BALI PROVINCE*) dengan periode penelitian dari tahun 2010-2015 sedangkan peneliti sekarang meneliti “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah” dengan menggunakan periode dari tahun 2013-2017.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka akan dilakukan suatu penelitian dengan judul: “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian mengenai alokasi belanja modal sebelumnya telah dilakukan oleh Ni Putu Santi Suryantini, Ica Rika Candraningrat, dan Ni Made Wulandari Kusumadewi (2017) yang berhasil membuktikan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh secara positif terhadap alokasi Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mencoba meneliti kembali variabel-variabel yang berpengaruh positif maupun tidak terhadap alokasi Belanja Modal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti diantaranya :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang dianalisis dan diidentifikasi, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi Belanja Moda pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi Belanja Modal.

2. Bagi Peneliti lainnya

Mampu menjadi bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang sedang dan akan melakukan penelitian pada bidang kajian ini.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam mengembangkan pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai pengaruh dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi Belanja Modal.

4. Bagi Sektor Publik dan Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi kepada masyarakat serta pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengenai Belanja Modal dan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. Signifikansi lainnya termasuk memberikan informasi kepada sektor publik dan pemerintah berkenaan mengenai manajemen belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan manajemen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kepentingan masyarakat dengan meningkatkan penyerapan dana terkait dengan optimalisasi Belanja Modal dan kepentingan umum.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Sistematika penulisan tersebut diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi pemaparan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari hasil penelitian.